

**LAPORAN MBKM *By Design* FKM UNAIR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)  
KOTA SURABAYA**

**IMPLEMENTASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)  
DI SMP NEGERI 43 SURABAYA**



**RAHMAH CHRISTIAWAN  
102011133265**

**Divisi Biostatistika dan Kependudukan**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
SURABAYA**

**2023**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG MBKM  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA SURABAYA**

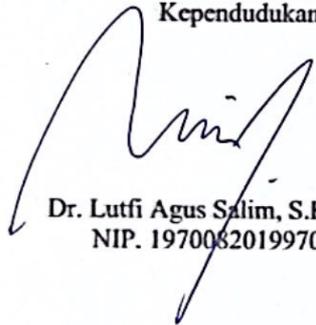
Disusun Oleh:

**RAHMAH CHRISTIAWAN**

NIM. 102011133265

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing Magang MBKM  
Divisi Biostatistika dan  
Kependudukan



Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si.  
NIP. 197006201997021001

Pembimbing Lapangan Magang  
MBKM DP3APKB



Rio Darmawan Jaya, S.H.

Koordinator Program Studi Kesehatan  
Masyarakat Program Pendidikan  
Sarjana



Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes.  
NIP. 197311151999032002

Ketua Divisi  
Biostatistika dan Kependudukan



Dr. Soenamatalina Melaniani, Ir.,  
M.Kes.  
NIP. 196012251990032001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan MBKM *by Design* FKM UNAIR di DP3APPKB Pemerintah Kota Surabaya dengan judul “Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 43 Surabaya”. Dalam Penyusunan dan penulisan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, dengan senang hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Santi Martini dr., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
2. Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
3. Dr. Fariani Syahrul, S.KM., M.Kes., selaku Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan dan Promosi Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
4. Dr. Rr. Soenarnatalina M., Ir., M.Kes. selaku Ketua Divisi Biostatistika dan Kependudukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
5. Bian Shabri Putri Irwanto, S.KM., M.KKK. selaku Koordinator MBKM *by Design* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
6. Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik MBKM *by Design* Fakultas Kesehatan Masyarakat
7. Dra. Ida Widayati, M.M. selaku Kepala Dinas di DP3APPKB Surabaya
8. dr. Atiek Tri Arini, M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di DP3APPKB Surabaya
9. Rio Darmawan Jaya. S.H. selaku pembimbing instansi MBKM *by Design* Fakultas Kesehatan Masyarakat di DP3APPKB Surabaya
10. Agung Hendra Saputro, S.H. selaku penguji luar dalam pelaksanaan Seminar Hasil MBKM *by Design*
11. Ervan Dwi P., A.Md. dan Silvi Nur Azizah, S.E. selaku mentor kami dalam MBKM *by Design*
12. Seluruh OPD dan staff yang berada di DP3APPKB yang senantiasa membantu dan membimbing
13. Teman-teman peminatan Biostatistika dan Kesehatan Reproduksi yang selalu menemani dan memberikan semangat selama MBKM *by Design*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan MBKM *by Design* FKM UNAIR ini berguna dan bermanfaat baik diri sendiri maupun pihak lain.

Surabaya, 20 Desember 2023

Rahmah Christiawan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.2.1 Tujuan Umum .....	3
1.2.2 Tujuan Khusus .....	3
1.3 Manfaat .....	3
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi.....	4
1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan (Instansi/ Dinas) .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Implementasi Kebijakan.....	5
2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan .....	5
2.1.2 Unsur-unsur Implementasi .....	5
2.1.3 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan .....	7
2.2 Gambaran Kependudukan Indonesia .....	8
2.2.1 Jumlah dan Kondisi Penduduk Indonesia .....	8
2.2.2 Penduduk Usia Remaja Indonesia.....	9
2.3 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).....	10
2.3.1 Definisi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).....	10
2.3.2 Prinsip Dasar Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).....	11
2.3.3 Alur Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).....	12
2.3.4 Pengukuran Indikator Keberhasilan Penerapan SSK.....	15
2.4 Integrasi Isu Kependudukan Dalam Kurikulum 2013 .....	16
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Lokasi MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	19
3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR .....	19

3.3 Metode Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
4.1 Gambaran Umum Instansi / Mitra .....	21
4.2 Kegiatan Pelaksanaan Magang .....	24
4.3 Learning Outcome.....	27
4.4 Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 43 Surabaya.....	29
4.5 Kendala Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	35
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
5.1 Kesimpulan .....	36
5.2 Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Proyeksi Jumlah Remaja Indonesia Tahun 2025-2050 (Sumber : Badan Pusat Statistik).....	10
Table 3.1 Jadwal Kegiatan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya.....	19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) .....	22
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) .....	23
Gambar 4.3 Kepengurusan SSK SMP Negeri 43 Surabaya.....	37
Gambar 4.4 Kegiatan Integrasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan PIK-R SMP Negeri 43 Surabaya .....	41
Gambar 4.5 Pojok Kependudukan SMP Negeri 43 Surabaya .....	42
Gambar 4.6 Papan Nama Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Logbook MBKM <i>by Design</i> FKM.....	45
Lampiran II. Dokumentasi <i>Assesment</i> Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 43 Surabaya.....	63
Lampiran III. Dokumentasi Kegiatan Magang MBKM.....	65
Lampiran VI. Hasil <i>Assesment</i> SSK SMP Negeri 43 Surabaya.....	65
Lampiran V. Surat Penugasan <i>Assesment</i> SSK.....	65
Lampiran VI. Surat Penugasan Advokasi SSK.....	65
Lampiran VII. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi SSK.....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar yakni 278,69 jiwa pada pertengahan tahun 2023 ini dan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga tahun 2050. Hal ini akan membawa Indonesia menjadi negara ke-6 dengan penduduk terbesar di Dunia. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menuntut pengelolaan yang ideal agar permasalahan dari berbagai aspek dapat dikendalikan dan dicegah. Perlu adanya upaya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk dan pemanfaatan SDM yang tepat guna untuk menjadi modal pembangunan yang kuat. Dengan peningkatan jumlah penduduk akan memunculkan isu dan permasalahan kependudukan. Tentunya semua hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya isu dan permasalahan kependudukan yang menjadi isu sentral dalam pembangunan. Indonesia mengalami dinamika perubahan struktur uisa penduduk yang berdampak pada menurunnya proporsi penduduk non produktif dan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Secara potensial kondisi perubahan struktur usia penduduk ini dapat menjadi suatu potensi maupun menjadi bumerang sangat baik untuk mendukung kemajuan bangsa.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif merupakan buah hasil dari program seperti KB selama berpuluh tahun sebelumnya telah mampu menggeser penduduk berusia di bawah 15 tahun (anak-anak dan remaja) yang awalnya besar di bagian bawah piramida penduduk Indonesia ke penduduk yang berusia lebih tua (produktif 15-64 tahun). Struktur penduduk yang memiliki penduduk usia produktif lebih besar maka akan dapat menguntungkan angka ketergantungan antara penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Dengan peningkatan penduduk usia produktif menjadi sebuah bonus demografi Indonesia dalam evolusi kependudukan. Bonus demografi inilah yang menjadi tonggak untuk meningkatkan produktivitas suatu bangsa melalui pemanfaat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif. Secara potensial, bonus demografi dapat menjadi pendukung kesejahteraan penduduk dan dapat menjadi suatu bumerang untuk penduduk itu sendiri. Tantangan Indonesia untuk menghadapi bonus demografi ini adalah mengupayakan Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif yang melimpah dapat dikonversi menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, kualitas, dan kreativitas agar tidak menjadi isu permasalahan kependudukan.

Salah satu usia produktif penduduk adalah remaja yang diperkirakan akan terus bertambah dan diperkirakan jumlahnya lebih dari 47 juta jiwa. Indonesia menghadapi permasalahan remaja yang memiliki kompleksitas yang tinggi sebagai contoh Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, dan Napza). Tidak hanya itu, permasalahan kependudukan menjadi permasalahan kompleks yang berkaitan dengan beban pengeluaran yang tidak dapat ditanggung sehingga meningkatkan risiko kemiskinan yang akan memengaruhi kualitas dan kesejahteraan hidup remaja. Remaja menjadi *agent of change* masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan, sehingga kehidupan generasi sekarang peduli dengan kondisi generasi masa yang akan datang dengan mempertimbangkan keterkaitan timbal balik antara permasalahan kependudukan dan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan melalui Pendidikan Kependudukan.

Dalam proses implementasi pendidikan kependudukan di tingkat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, stakeholder dan mitra kerja di daerah wajib untuk mengimplementasikan kerjasama pendidikan kependudukan, baik melalui jalur formal, nonformal dan informal dengan tujuan remaja memiliki perilaku yg bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian perlu adanya pendidikan kependudukan melalui

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang telah dilakukan oleh 168 sekolah di Kota Surabaya. Pada laporan magang ini akan membahas implementasi dan pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) baik melalui jalur formal dalam mata pelajaran dan jalur informal melalui kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 43 yang berada di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui dan menganalisis implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 43 yang berada pada Kecamatan Bubutan Kota Surabaya

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 43 yang berada pada Kecamatan Bubutan Kota Surabaya
2. Mengetahui pelaksanaan program Ekstrakurikuler dan PIK-R yang berhubungan dengan Kependudukan dan Keluarga Berencana
3. Mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 43 Kota Surabaya

## **1.3 Manfaat**

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya

### **1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

1. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.
2. Mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.

3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bersosialisasi serta bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim yang memiliki perbedaan latar belakang keilmuan, karakter, dan perilaku.

### **1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

1. Memperluas jaringan kerjasama dengan dinas dan lembaga lain yang terkait sehingga mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Memperoleh *feedback* dari instansi magang sebagai bahan evaluasi terhadap kurikulum dan metode pembelajaran, serta program pengembang kompetensi dan *softskill* yang dibutuhkan mahasiswa di dunia kerja.

### **1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan (Instansi/ Dinas)**

1. Memberikan informasi, masukan, serta pertimbangan dalam menerapkan kebijakan program selanjutnya untuk kemajuan baik dari segi teknis maupun administratif.
2. Meningkatkan mutu kinerja instansi secara efektif dan efisien

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Implementasi Kebijakan**

##### **2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky (1978) mengemukakan bahwa secara etimologis implementasi menjadi suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sedangkan implementasi kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menyelesaikan atau melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Peneliti lain menggambarkan bahwa implementasi menjadi suatu proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Dalam prosesnya, implementasi mengandung logika *top-down* yang menjadi proses untuk menurunkan suatu alternatif yang makro menjadi alternatif yang bersifat mikro dan konkrit. Tidak hanya itu, suatu implementasi perlu adanya formulasi kebijakan yang mengandung logika *bottom up* dengan memetakan kebutuhan publik atau lingkungan dengan mencari dan memilih alternatif pemecahan masalah untuk ditetapkan sebagai suatu kebijakan.

##### **2.1.2 Unsur-unsur Implementasi**

Menurut Abdullah (1988) dan Smith (1977), unsur-unsur implementasi mutlak harus memiliki 3 hal utama antara lain unsur pelaksana (*implementator*), adanya program yang dilaksanakan, dan sasaran (*target groups*).

###### **1. Unsur Pelaksana**

Menurut Dimock & Dimock (1984) fase pertama yang harus dilaksanakan yakni menetapkan tujuan dan sasaran dari perencanaan berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan. Perencanaan yang telah ditetapkan merupakan hasil dari berbagai keputusan yang telah diambil. Perencanaan ini akan dijelaskan pada program-program operasional yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional.

Dengan demikian, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya sehingga output dari fase pertama ini merupakan kebijakan teknis yang berbentuk struktur program. Setelah terbentuk struktur program, maka dilanjutkan pada fase kedua yakni pengorganisasian. Melalui tindakan pengorganisasian maka akan terbentuk tim yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui pengorganisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata kerja perlu dikelola dan ditata dengan baik sehingga dapat digerakan dalam implementasi kegiatan. Pada fase terakhir, unsur pelaksana harus mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan untuk meninjau keberhasilan program dalam proses pelaksanaan dengan melalui adanya pengawasan. Tujuan dari adanya pengawasan yakni untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu berlangsung dengan daya guna, hasil guna, dan produktivitas yang tinggi dan dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditentukan serta terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasional. Untuk mengetahui hasil dari pengawasan ini perlu juga dilakukan dengan adanya penilaian yang menjadi langkah terakhir untuk menjadi tindakan pengukuran dan pembandingan antara pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan hasil nyata.

## **2. Unsur Program**

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pelaksana, tetapi juga secara rinci juga menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan, kejelasan metode, dan prosedur kerja yang harus dijalankan dan kejelasan standar yang harus ditaati. Sejalan dengan pendapat Siagian (1985), program harus memiliki sasaran yang hendak dicapai, jangka waktu untuk menyelesaikan suatu

program, besar biaya dan sumber yang digunakan, jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan menurut kualifikasi dan kuantitas yang diperlukan.

### **3. Unsur Sasaran**

Target group (kelompok sasaran) adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Sasaran diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, efektivitas ini akan dipengaruhi oleh karakteristik sasaran berdasarkan lingkungan geografis, sosial dan budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

#### **2.1.3 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan**

Menurut Abidin dalam Mulyadi (2016: 60-61) melihat prosesnya implementasi bergantung pada dua faktor utama antara lain faktor internal dan faktor primer eksternal. Faktor internal yang paling penting mencakup kebijakan yang ada dan faktor-faktor yang mendukungnya. Faktor eksternal terpenting saat ini antara lain kondisi lingkungan dan pemangku kepentingan.

Kebijakan adalah faktor internal terpenting dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pertama, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan bergantung pada dua faktor antara lain kualitas kebijakan dan strategi implementasi. Kebijakan yang tidak berkualitas, tidak bermanfaat untuk diimplementasikan. Strategi implementasi yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, banyak kesalahan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh isi kebijakannya saja yang lemah, tetapi juga strategi implementasinya.

Faktor internal penting kedua dalam proses implementasi adalah sumber daya yang menjadi faktor pendukung kebijakan. Faktor pendukung ini dalam pengertian ekonomi bisnis biasa disebut sebagai inputs. Namun dalam beberapa hal ada perbedaan antara inputs dalam pengertian bisnis dengan faktor pendukung dalam pengertian manajemen atau kebijakan publik ini. Input dalam pengertian ekonomi mikro meliputi apa yang disebut 6M (Men, Money, Material, Method, Machine, dan Market). Sementara itu, faktor pendukung dalam kebijakan publik meliputi sumberdaya manusia, keuangan, logistic, informasi, legitimasi dan partisipasi.

Faktor-faktor yang mempersulit implementasi kebijakan antara lain:

1. Kondisi fisik seperti perubahan musim dan bencana alam yang sering menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan.
2. Faktor politik yang terjadi karena adanya perubahan politik dan terjadi pergantian Pemerintahan dapat mengubah arah atau pendekatan yang berdampak pada implementasi
3. Tabiat dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijakan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan. Akibatnya terjadi perubahan kebijakan sebelum itu dilaksanakan
4. Terjadi penundaan karena keterlambatan atau kekurangan faktor input. Keadaan ini terjadi karena faktor pendukung yang tidak diharapkan
5. Kelemahan ini yang terjadi akibat dari adanya teori yang mendasari suatu kebijakan sehingga tidak sesuai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan

## **2.2 Gambaran Kependudukan Indonesia**

### **2.2.1 Jumlah dan Kondisi Penduduk Indonesia**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2023 mencapai 278.696,2 ribu jiwa dan diproyeksikan oleh United Nation (UN) Penduduk Indonesia akan mengalami peningkatan pada 2050 menjadi 309 juta jiwa. Pada tahun 2023 Indonesia

mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,08 persen. Kondisi Indonesia pada saat ini sedang mengalami masa bonus demografi yang akan dinikmati oleh Indonesia sampai dengan tahun 2030. Era bonus demografi ini menjadi dinamika perubahan struktur umur dengan kondisi menurunnya proporsi penduduk non produktif dan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Berdasarkan perhitungan para ahli demografi terhadap indikator dasar kependudukan bonus demografi akan dinikmati oleh Indonesia sampai dengan sekitar tahun 2030 dan selanjutnya secara perlahan akan hilang oleh karena makin membesarnya proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Indonesia pada kurun waktu 2020-2030 akan menikmati *window of opportunity* dengan rasio ketergantungan sangat rendah (sekitar 44 persen). Pada kurun waktu tersebut jumlah penduduk di Indonesia berkisar antara 268 juta jiwa (2020) dan 293 juta jiwa (2030). Jumlah penduduk usia produktif pada kurun waktu yang sama adalah 198,5 juta dan 200,3 juta. Secara potensial, kondisi ini sangat baik untuk mendukung kemajuan bangsa. Besarnya proporsi penduduk usia produktif khususnya usia muda merupakan faktor kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan saat ini. Salah satu faktor kunci untuk memaksimalkan *window of opportunity* yakni pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

### **2.2.2 Penduduk Usia Remaja Indonesia**

Menurut *World Health Organization* (WHO), remaja adalah penduduk laki-laki dan perempuan berusia 10-19 tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya hingga mencapai kematangan seksual. Sedangkan menurut (Monks, dkk 1992) mendefinisikan remaja merupakan sifat transisi atau peralihan yang belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status sebagai anak. Para ahli menyebutkan batasan usia remaja yang umum digunakan antara lain usia 12-15 tahun masa remaja awal, usia 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah remaja diproyeksikan akan meningkat jumlahnya.

Table 2.1 Proyeksi Jumlah Remaja Indonesia Tahun 2025-2050 (Sumber : BPS)

Tahun	Jumlah Remaja Indonesia
2025	47.640.463
2030	49.061.153
2035	50.481.843
2040	5.902.533
2045	53.323.223
2050	54.741.913

Remaja menjadi sebuah aset Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar bagi bangsa sehingga perlu adanya persiapan dan pembinaan yang terkelola dengan baik. Remaja memiliki banyak potensi yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan untuk menjadi remaja yang berkualitas. Masa remaja merupakan masa yang rentan karena pada masa ini remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mencari aktivitas dan pengalaman baru. Pada era perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini menjadikan remaja perlu ditumbuhkan dan dikuatkan sikap dan perilaku yang positif melalui pendidikan yang dikelola dengan baik. Selain itu, untuk mencegah adanya permasalahan pada remaja maka perlu dilakukan upaya kegiatan yang positif seperti mengisi waktu luang dengan mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan akademis maupun non akademis, melakukan pembekalan untuk bijaksana memanfaatkan teknologi, dan menumbuhkan kepedulian untuk permasalahan kependudukan dan permasalahan sosial agar remaja memiliki rasa empati dan simpati. Dengan persiapan dan pendidikan yang baik, diharapkan dapat menciptakan remaja yang berprestasi dan berkarakter positif.

## **2.3 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)**

### **2.3.1 Definisi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)**

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan.

Penerapan pendidikan kependudukan ini tidak hanya didalam kelas, tetapi juga diterapkan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling. Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini didukung dengan adanya Pojok Kependudukan (Population Corner) sebagai salah satu sumber dan bacaan belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan karakter generasi berencana.

### **2.3.2 Prinsip Dasar Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)**

Prinsip Dasar pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) antara lain

1. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan pengetahuan umum untuk para peserta didik agar dapat memberikan bekal dalam persiapan bermasyarakat dan bernegara.
2. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) menjadi strategi dalam memberikan informasi manfaat dan dampak akan kependudukan melalui integrasi mata pelajaran, kegiatan kesiswaan, bimbingan konseling dan kegiatan yang relevan lainnya.
3. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan dan tidak menjadikan sebagai mata pelajaran baru sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi dengan adanya integrasi materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) menjadi wadah bagi program-program yang telah direncanakan oleh BKKBN seperti PIK Remaja Jalur Pendidikan dan Genre *Goes To School* sehingga dapat berjalan berdampingan dan simultan
5. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan program berbasis kurikulum nasional sehingga tidak akan ada perbedaan karakteristik wilayah baik secara geografis maupun administratif

6. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), bersifat gradual meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran sehingga akan terus menerus mengalami pengembangan.
7. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) konsisten dilaksanakan selama mata pelajaran tersebut dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum.
8. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) mengedepankan peran aktif peserta didik untuk mengamati, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta mengkomunikasikan data kependudukan di tempat tinggal mereka sendiri. Dengan demikian, implementasi SSK diharapkan akan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerah tempat tinggalnya masing-masing.

### **2.3.3 Alur Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)**

1. Proses Pembentukan
  - a. Persiapan (rapat koordinasi antar OPD dan mitra terkait);
  - b. Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi dengan lembaga terkait (Perwakilan BKKBN, Dinas/Badan KKB, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama) sesuai dengan peran dan kewenangannya;
  - c. Sosialisasi kepada warga sekolah tentang penerapan SSK di sekolah yang bersangkutan;
  - d. Penyiapan materi/modul pendidikan kependudukan yang telah tersedia (Nasional dan Daerah);
  - e. Orientasi/Diklat guru-guru (guru mata pelajaran dan bimbingan konseling) seputar pengetahuan kependudukan;
  - f. Koordinasi dan penguatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) tentang penerapan SSK di sekolah yang bersangkutan;
  - g. Dilengkapi dengan perpustakaan/informasi tentang materi-materi kependudukan (Population Corner/Pojok Kependudukan);

- h. Uji coba pelaksanaan;
- i. Pencanaan SSK;
- j. Pelaksanaan pendidikan kependudukan di sekolah.

## 2. Mekanisme Operasional

### a. Umum

- i. Penerapan pendidikan kependudukan melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran (mapel).
- ii. Penerapan pendidikan kependudukan melalui kerjasama dengan profesi terkait untuk penjelasan tambahan dalam mata pelajaran seperti melibatkan bidan dalam memberikan informasi kesehatan reproduksi di mata pelajaran biologi
- iii. Penerapan pendidikan kependudukan melalui kegiatan kesiswaan lainnya yang relevan dan bimbingan konseling, contoh Genre, PIK KRR, Lomba Karya Tulis Kependudukan, dan lain-lain.

### b. Guru Pengampu Mata Pelajaran dan Bimbingan Konseling, melakukan:

- i. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembaran Kerja peserta didik yang akan digunakan dalam kegiatan, diantaranya memetakan Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti yang sesuai
- ii. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai prinsip-prinsip Sekolah Siaga Kependudukan;
- iii. Menyampaikan materi KKBPK dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pelajaran dalam kurikulum;
- iv. Dukungan dalam rangka peningkatan keterampilan peserta didik dalam mengobservasi isu kependudukan di wilayahnya
  - a) Membuat master instrumen untuk menggali data kependudukan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal.
  - b) Melakukan simulasi pelaksanaan penggalian informasi kepada masyarakat setidaknya kepada 2 (dua) orang informan.

- c) Menjelaskan kepada peserta didik cara analisis sederhana mengenai data demografi penduduk.
  - d) Aktif sebagai pembimbing dalam Pojok Kependudukan untuk berdiskusi maupun sebagai ruang konsultasi peserta didik.
  - e) Pengembangan sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik.
- c. Peserta didik
- i. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembaran Kerja peserta didik yang akan digunakan dalam kegiatan, diantaranya memetakan Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti yang sesuai
  - ii. Menyiapkan instrumen penggalan informasi yang sudah disiapkan oleh guru pengampu.
  - iii. Melakukan penggalan informasi kepada masyarakat di sekitarnya, melalui metode:
    - a) Melihat data informasi demografi dari instansi pemerintahan setempat (RT/RW/dusun, desa/kelurahan, kecamatan dan dinas terkait yang diperlukan).
    - b) Melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat dengan metode sampling berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam suatu wilayah, untuk melakukan wawancara mendalam.
    - c) Merekapitulasi data yang dikumpulkan. d) Melakukan analisis sederhana.
    - d) Mendiskusikan hasil penggalan data dan hasil analisis kepada guru pengampu.
    - e) Mempresentasikan hasil analisis data kependudukan kepada teman sekelas. Hal ini dimaksudkan agar para peserta didik memahami kondisi kependudukan di wilayahnya.

- f) Peserta didik melalui guru pengampu yang bersangkutan diharapkan dapat menyimpulkan dan dapat memberikan rekomendasi hasil penerapan SSK.

#### **2.3.4 Pengukuran Indikator Keberhasilan Penerapan SSK**

##### 1. Input (Masukan)

- a. Teridentifikasinya sekolah-sekolah rintisan yang representatif baik dari segi kompetensi guru, dukungan kepala sekolah, dukungan komite sekolah, maupun dukungan sarana lain.
- b. Ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk pelaksanaan Program Kependudukan, dan Keluarga Berencana tidak hanya berasal dari APBD dan APBN, dapat pula dukungan yang berasal dari sumber lain.
- c. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

##### 2. Proses (Kegiatan)

- a. Penyampaian materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja peserta didik.
- b. Terlaksananya kunjungan peserta didik ke kantor/dinas/instansi terkait dalam rangka mencari informasi kependudukan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar.
- c. Pengolahan data kependudukan berbasis IT yang dilakukan para peserta didik dalam mengolah data yang diperoleh.
- d. Meningkatnya keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan analisis data-data kependudukan.
- e. Meningkatnya kemampuan peserta didik dalam melakukan analisis terhadap masalah-masalah kependudukan.
- f. Meningkatnya pemahaman peserta didik mengenai masalah-masalah kependudukan yang ditujukan dengan hasil kuesioner

terhadap pernikahan di usia muda dan kesadaran kesehatan reproduksi

3. Output (Keluaran)
  - a. Pemahaman tentang kependudukan, baik kuantitas, kualitas persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, pentingnya kesehatan reproduksi dan pembentukan keluarga yang berkualitas.
  - b. Diharapkan dapat meminimalisir perkawinan usia anak

#### **2.4 Integrasi Isu Kependudukan Dalam Kurikulum 2013**

Untuk mengintegrasikan isu kependudukan dengan kurikulum 2013, diawali dengan pemetaan kompetensi dasar dan mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dengan isu kependudukan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menginventarisasi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar masing-masing mata pelajaran

Kompetensi Inti yang dimaksud mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasikan muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan, sehingga apapun yang diajarkan pada mata pelajaran di setiap jenjang kelas, hasil akhirnya adalah kompetensi inti harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Dengan kata lain, kompetensi inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran dan pengorganisasi kompetensi dasar. Dalam menginventarisasi kompetensi kurikulum 2013, berfokus pada kompetensi inti dan kompetensi dasar ranah

pengetahuan (KI-3, KD-3) serta kompetensi inti dan kompetensi dasar ranah keterampilan (KI-4, KD-4) yang terdapat di masing-masing mata pelajaran.

2. Mengkaji kompetensi dasar yang selaras dan dapat diintegrasikan dengan isu kependudukan

Pada dasarnya hampir semua mata pelajaran dapat diintegrasikan dengan isu kependudukan. Untuk mengintegrasikannya cukup menganalisis dengan cermat manakah diantara kompetensi dasar tersebut yang dapat diintegrasikan dengan isu kependudukan.

3. Mengkaji silabus

Dalam kurikulum 2013, silabus sudah disediakan oleh pemerintah, guru hanya mengembangkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian kompetensi yang dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dalam silabus diuraikan kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji silabus yaitu bagian materi pokok, disini kita harus memilih materi pokok mana yang dapat diintegrasikan dengan isu kependudukan

- A. Menyusun RPP

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) perlu diperhatikan ketika mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar kesatu (KD-1) tentang sikap spritual dan kompetensi dasar kedua (KD-2) tentang sikap sosial, indikatornya tidak dikembangkan karena dicapai melalui proses pembelajaran tidak langsung. Adapun yang dikembangkan ke dalam indikator pencapaian kompetensi cukup KD-3 mengenai pengetahuan dan KD-4 keterampilan, karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran langsung. Dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, perlu diperhatikan pula kata kerja operasional (KKO) yang digunakan untuk pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa.

- B. Menyiapkan materi

Materi harus selaras dengan silabus dan RPP yang telah disusun.

Untuk bahan materi dapat menggunakan buku siswa dan buku guru kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek serta materi isu-isu kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN.

### BAB III

#### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Lokasi MBKM *by Design* FKM UNAIR

Kegiatan MBKM dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera yang dilakukan pada:

Jalan : Kedungsari Nomor 18 Kota Surabaya

Telepon : (031) 5346317

Email : dp3appkb@surabaya.go.id

Bidang : Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.

#### 3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR

Pelaksanaan kegiatan MBKM dimulai dari tanggal 2 Oktober 2023 hingga 22 Desember 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut

*Table 3.1* Jadwal Kegiatan MBKM *by Design* FKM UNAIR di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya

No	Kegiatan	Agustus				Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Pre Pelaksanaan Magang</b>																	
1.	Pembelahan Magang oleh Fakultas																
2.	Pemilihan Proposal Magang kepada instansi																
<b>Pelaksanaan Magang</b>																	
1.	Pembelahan magang oleh instansi																
2.	Pembelahan magang oleh instansi																
3.	Pelaksanaan kegiatan magang																
<b>Posta Pelaksanaan Magang</b>																	
4.	Penyusunan laporan magang																
5.	Simulasi hasil magang																

#### 3.3 Metode Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR

Dalam pelaksanaan magang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera dengan beberapa metode yang digunakan saat kegiatan magang berlangsung yang terdiri dari:

1. Observasi, yakni peserta MBKM melaksanakan peninjauan dan pengamatan terhadap suatu pelaksanaan kegiatan di instansi tempat magang.
2. Partisipasi, yakni peserta magang ikut serta membantu dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi tempat magang.
3. *Indepth Interview*, yakni metode wawancara mendalam yang digunakan dengan pegawai instansi tempat magang untuk memperoleh informasi terkait cakupan dan tupoksi kerja serta menanyakan suatu hal yang kurang dimengerti untuk memperoleh penjelasan dalam suatu permasalahan atau suatu kegiatan.
4. Diskusi dan tanya jawab berupa pengarahan dan penjelasan dari pembimbing magang institusi serta pegawai instansi tempat magang untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai ilmu yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.
5. Studi literatur dengan mencari bahan referensi untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan selama kegiatan magang.
6. *Assesment* dengan melaksanakan penilaian terhadap program yang telah direncanakan oleh DP3APPKB

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diambil dan didapatkan selama kegiatan MBKM yakni data primer dan data sekunder berupa hasil *assesment* dan data sekolah yang menjadi SSK di Kota Surabaya pada Tahun 2022 dan 2023. Data primer yang digunakan dan diolah oleh individu dalam laporan akhir MBKM yakni data primer hasil *assesment* yang tersebar di beberapa sekolah di Kota Surabaya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi / Mitra**

##### **4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya**

DP3APPKB Kota Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang telah dirancang. DP3APPKB Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Visi dan Misi DP3APPKB Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat

2. Misi

- a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga
- c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya terletak di Jalan Kedungsari Nomor 18 Kota Surabaya.

#### 4.1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



*Gambar 4.1* Peta Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

DP3APPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi berdasarkan peraturan walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) terbagi menjadi tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan antara lain

##### 1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan DP3APPKB melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;



#### **4.1.3.2 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :Pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak
2. Pelaksanaan penguatan jejaring perlindungan perempuan dan anak
3. Pelaksanaan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak
4. Pelaksanaan penjangkauan permasalahan perlindungan perempuan dan anak
5. Pelaksanaan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban permasalahan

#### **4.1.3.3 Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera**

Tugas dan fungsi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
2. Pelaksanaan pemberdayaan kader Keluarga Berencana
3. Pelaksanaan peningkatan partisipasi dalam program Keluarga Berencana
4. Melaksanakan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana
5. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi pelaksanaan penyusunan Profil Kependudukan dan kajian dampak kependudukan.

#### **4.2 Kegiatan Pelaksanaan Magang**

1. Pelaksanaan Awal Magang

Pada awal pelaksanaan awal, seluruh peserta dibagi menjadi 4 kelompok untuk memudahkan pelaksanaan magang dan peserta MBKM FKM UNAIR diberikan pembekalan mengenai

- a. Pemaparan dan tutorial cara menggunakan aplikasi VERVAL dan ELSIMIL yang dilanjutkan dengan pembagian tugas input data pada aplikasi ELSIMIL di setiap kelompok
- b. Tugas yang diberikan pada kelompok 3 yakni bertugas untuk entry data Ibu Hamil, Calon Pengantin, Ibu Nifas berdasarkan kecamatan Kenjeran, Pabean Cantian, Bulak, Genteng, Tegalsari, Simokerto, Semampir, dan Bubutan
- c. Pelaksanaan Evaluasi Entry Data ELSIMIL
- d. Sosialisasi Aplikasi SIPERINDU (Deteksi Dini Kependudukan dalam Turunkan Stunting dan Hadapi Bonus Demografi)
- e. Pemaparan dan diskusi mengenai jadwal turun lapangan pelaksanaan *Assesment* SSK

## 2. Pelaksanaan *Assesment* SSK

Tujuan dari adanya pelaksanaan *Assesment* SSK di Kota Surabaya yakni untuk melihat dan mengetahui kondisi secara real di lapangan tentang implementasi yang telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah SMP dan SMA di Kota Surabaya. Pelaksanaan *Assesment* SSK ini dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 31 Oktober 2023. Hasil dari *assesment* ini dilaporkan kepada pimpinan berupa rekapitulasi sekolah yang telah memenuhi beberapa instrumen penilaian yakni

- a. Surat Keputusan (SK) Pembentukan SSK,
- b. Pojok Kependudukan yang telah dibentuk atau dilaksanakan,
- c. Keikutsertaan dalam sosialisasi SSK
- d. Orientasi dalam penyusunan modul ajar atau RPP yang melibatkan guru,
- e. Tersusun kurikulum materi kependudukan dalam pembelajaran di kelas (Dilaporkan berupa berapa jumlah kurikulum yang tersusun dan materi apa saja yang diintegrasikan)

- f. Integrasi materi kependudukan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kesiswaan
- g. Papan nama SSK yang telah dibentuk oleh sekolah
- h. Tersedianya PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)
- i. Kesiediaan sekolah mengikuti kegiatan SSK

### 3. Pelaksanaan Pelaporan Hasil *Assesment* SSK

Setelah melaporkan hasil rekapitulasi berdasarkan instrumen, peserta magang melakukan pengelompokan kategori sekolah yang menjadi SSK Tingkat Paripurna, SSK Tingkat Dasar, Sekolah yang hanya terdaftar menjadi SSK akan tetapi belum melaksanakan, dan sekolah yang tidak bersedia untuk menjadi SSK. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil *assesment* yang ditarik akar permasalahan dari hambatan sekolah dalam pelaksanaan SSK. Rencana Tindak Lanjut dibagi menjadi 3 program utama yakni Advokasi untuk sekolah yang tidak bersedia menjadi SSK, Sosialisasi dan Pelatihan, dan Pendampingan.

### 4. Pelaksanaan Hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL)

#### a. Pelaksanaan Advokasi

Dalam pelaksanaan advokasi setiap kelompok akan didampingi oleh mentor dari DP3APPKB. Pelaksanaan advokasi ini dengan cara mengunjungi sekolah secara langsung untuk melakukan diskusi dengan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, atau yang bertugas. Tujuan dari adanya advokasi yakni memberikan penjelasan ulang agar sekolah bersedia dan setuju untuk membentuk SSK. Pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh kelompok 3 dilaksanakan di 5 sekolah antara lain, SMP Islam, SMP Muhammadiyah 2, SMA Negeri 19, Pondok Pesantren Al Fitroh, dan SMP PGRI 8. Dari lima sekolah yang telah diadvokasi, 4 sekolah bersedia untuk membentuk SSK, akan tetapi hanya 1 sekolah yang telah mengirimkan SK Pembentukan SSK dan RPP atau modul ajar integrasi SSK.

#### b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan SSK dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 di Graha Sawunggaling Lantai 6 Surabaya. Kegiatan ini mengundang sasaran antara lain Kepala Sekolah, Guru IPS atau Guru Ekstrakurikuler, dan Perwakilan pengurus OSIS. Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini yakni Dr. Lutfi Agus Salim S.KM., M.Kes. selaku Koalisi Kependudukan Jawa Timur dan Supriyanto S.Pd. M.Pd. selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan untuk menjelaskan integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini ditujukan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi tentang program SSK dan memberikan pelatihan bagi sekolah dalam pembuatan RPP atau modul ajar yang terintegrasi dalam pembelajaran.

### **4.3 Learning Outcome**

#### **4.3.1 Metodologi Penelitian**

Dalam melaksanakan kegiatan *assesment* Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), materi perkuliahan jenis, desain penelitian, populasi, dan sampel berguna dalam pelaksanaan ini. Pada kegiatan *assesment*, pendekatan penelitian yang dilakukan yakni menggunakan pendekatan kualitatif untuk memotret suatu fenomena melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumen *check list*. Hasil yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data dipaparkan dan digambarkan tentang situasi dan kondisi sekolah yang dilakukan *assesment* berupa uraian naratif. Jenis metode pelaksanaan *Assesment* Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat. Populasi penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan *Assesment* Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yakni seluruh sekolah yang telah mengikuti “Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTS, Jalur Non Formal, dan Informal” sebanyak 168 sekolah.

### **4.3.2 Pengantar Sistem Informasi Geografi**

Sistem informasi geografis dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan SSK yakni melakukan pemetaan sekolah yang telah menjalankan SSK maupun yang belum dengan menggunakan software QGIS 3.32.

### **4.3.3 Seks, Gender, dan Seksualitas**

Hal yang berhubungan dengan mata kuliah seks, gender, dan seksualitas dengan adanya kegiatan konseling yang dilakukan oleh Guru Bimbingan Konseling mengenai krisis identitas remaja dan mencari jati diri oleh remaja tersebut. Selain itu, pada pembelajaran Bimbingan Konseling, diberikan edukasi dan pemahaman tentang isu seksualitas seperti kekerasan, pelecehan, dan cara pelaporan apabila menjadi korban. Peran teman sebaya bagi peserta didik sangat penting dalam perkembangannya, akan tetapi guru memberikan informasi mengenai pembatasan interaksi sosial antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan sehingga peserta didik tidak melakukan kesenjangan dan meningkat rasa awareness yang berkaitan dengan gender dan seksualitas.

### **4.3.4 Aplikasi Komputer Analisis Kependudukan**

Pada implementasi SSK di SMP Negeri 43 Surabaya, peserta didik diajarkan tentang komposisi penduduk sekolah secara sederhana dengan menggunakan perhitungan matematika sederhana tentang seks rasio penduduk sekolah, total populasi sekolah, dan struktur sekolah secara sederhana dengan menggunakan excel.

### **4.3.5 Teknik Pengukuran Fertilitas, KB, dan Mortalitas**

Pada mata pelajaran matematika, siswa diajarkan tentang penataan dua variable yang berkaitan tentang kelahiran dan kematian penduduk dengan statistik sederhana diagram batang, garis, dan lingkaran.

### **4.3.6 Penilaian Kritis Kesehatan Reproduksi dan KIA**

Upaya kesehatan yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 43 Surabaya telah didukung oleh kebijakan pemerintahan setempat dengan menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas yang komprehensif dan optimal bagi peserta didik melalui adanya Unit Kesehatan Siswa (UKS). Puskesmas bekerjasama dengan UKS

bertanggungjawab untuk melaksanakan pemantauan kesehatan reproduksi dan kesehatan gizi. Selain itu, di SMP Negeri 43 Surabaya melakukan makan bersama dan minum tablet tambah darah bersama di Hari Jumat pagi dalam rangka peningkatan gizi anak dan pencegahan anemia pada remaja serta membentuk keluarga yang berkualitas dari remaja agar tidak melahirkan generasi stunting.

#### **4.3.7 Komunikasi Pemasaran Kesehatan Terintegrasi**

Mengajarkan kepada para siswa dan siswi yang bertanggung jawab pada program SSK untuk belajar komunikasi dalam memasarkan program tersebut dengan melaksanakan program sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan. Sasaran sosialisasi tersebut adalah peserta didik di SMPN 43 Surabaya.

#### **4.3.8 Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Hal yang berhubungan dengan mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni dengan adanya mata pelajaran dalam SSK di SMP Negeri 43 yang membahas mengenai hubungan aspek lingkungan dan komponen didalamnya serta mengamati komunitas yang ada didalam masyarakat dalam menentukan konsep satuan abiotik dan ekosistem.

#### **4.3.9 Teknik Sampling dan Besar Sample**

Pada pelaksanaan *assesment*, teknik sampling yang digunakan yakni menggunakan teknik *non probability sampling* dengan *sampling purposive* untuk mengetahui kondisi sekolah dalam pelaksanaan SSK maka ketika *assesment* sehingga sumber data yang diwawancarai yakni Kepala Sekolah atau Pembina SSK. Dengan menggunakan *purposive sampling* maka tim *assesment* dapat memilih sekolah yang ingin menjadi sasaran utama dengan memberikan kriteria inklusi dan eksklusi pada pemilihan sekolah sasaran.

### **4.4 Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 43 Surabaya**

Dalam proses pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 43 Surabaya melalui beberapa tahapan yang direncanakan setelah mengikuti Sosialisasi tentang Penerapan Sekolah Siaga Kependudukan antara lain:

1. Membentuk daftar *team* Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) SMP Negeri 43 Surabaya dan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 43 yang ditentukan melalui rapat koordinasi seluruh Guru dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga diperlukan pelaksanaan pembangunan secara terIntegrasi dalam Sistem Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan rincian kepengurusan yang disajikan dalam tabel berikut ini

No.	Keperluan/Unit Kerja	Nama	Keperluan
1.	Penyusunan dan Pelaksanaan	Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
2.	Pembinaan dan Pengawasan	Heri Seto, Ph.D., M.Pd.	Tim
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
3.	Pembina	Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
4.	Tim	Dr. Anif Anif, S.E.	Staff
5.	Kerjasama	Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
6.	Kerjasama	Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
7.	Kerjasama	Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
8.	Kerjasama	Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
9.	Kerjasama	Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
10.	Kerjasama	Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor
		Dr. Sri Rahmawati, M.Si.	Supervisor

Gambar 4.3 Kepengurusan SSK SMP Negeri 43 Surabaya

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Dalam menunjang keberhasilan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), perlu diintegrasikan pendidikan kependudukan di dalam mata pelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada implementasi untuk membentuk Sekolah Siaga Kependudukan, SMP Negeri 43 telah mempersiapkan dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembaran Kerja melalui koordinasi dan orientasi guru-guru mata pelajaran dan bimbingan konseling tentang Kependudukan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMP Negeri 43 Surabaya yang telah disusun antara lain:

a. Mata Pelajaran Matematika

Pada mata pelajaran matematika peserta didik mengenal dan mengidentifikasi angka kelahiran, angka kematian, dan jumlah pertumbuhan penduduk yang besar melalui adanya perbandingan jumlah

penduduk pada Tahun 2013 dan Tahun 2023 serta disajikan melalui diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selain itu, dalam mata pelajaran matematika, peserta didik diminta untuk menganalisis grafik yang telah disajikan untuk menggali faktor-faktor yang menjadi pemicu pertumbuhan penduduk di Indonesia.

b. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila diajarkan untuk siswa secara kritis dan analitis melalui perwujudan norma dari lingkup terkecil yakni keluarga dan masyarakat serta siswa diajarkan untuk berpartisipasi secara aktif melalui telaah kliping yang telah dibuat oleh siswa untuk memberikan contoh peristiwa yang terjadi di kehidupan bermasyarakat tentang permasalahan kependudukan Indonesia yang berkaitan dengan tindakan melawan norma dan hukum yang berlaku.

c. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Kegiatan inti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa mengembangkan dan berdiskusi untuk mencurahkan gagasan tentang berita pendidikan, kesehatan, dan permasalahan publik seperti Solusi Pernikahan Dini yang dilaksanakan di Kelas VII. Sedangkan di Kelas IX, siswa dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato kondisi sosial secara lisan dan/atau tulis yang bertemakan Penduduk Usia Remaja di Indonesia dengan tetap memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selain itu, di dalam RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan kependudukan yakni dengan melalui adanya puisi rakyat dan pantun dengan tema penduduk lanjut usia. Penilaian yang dilakukan oleh guru melalui aspek ketepatan struktur pantun, ketepatan jenis pantun, dan ketepatan makna pantun.

d. Mata Pelajaran IPA

Dalam proses kegiatan mengajar pada mata pelajaran IPA, siswa diberikan informasi mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya untuk menyadarkan siswa tentang interaksi yang akan menciptakan biodiversitas dan memberikan informasi kepada siswa

tentang interaksi makhluk hidup yang bermanfaat dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan rekreasi.

e. Mata Pelajaran IPS

Peserta didik dalam pembelajaran diminta untuk mengamati data jumlah penduduk Indonesia diantara negara lainnya di dunia, mengamati karakteristik tenaga kerja Indonesia, dan keadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka meningkatkan keaktifan dari peserta didik, maka diadakan pengumpulan informasi dari peserta didik tentang data jumlah penduduk di Indonesia, komposisi tenaga kerja berdasarkan usia dan pendidikan, dan mengidentifikasi permasalahan kependudukan yang belum diketahui. Dalam mengasosiasi peserta didik diwajibkan untuk menganalisis kesiapan Indonesia untuk menjadi negara maju dan permasalahan yang ditimbulkan.

f. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, peserta didik mengidentifikasi permasalahan kependudukan seperti perjudian, pertengkaran, dan pengedaran minuman keras yang dilarang oleh agama tetapi masih marak terjadi di kalangan masyarakat dan peserta didik diberikan edukasi oleh Guru mengenai efek minuman keras yang selalu berdampak negatif pada kehidupan bersosial.

g. Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Olahraga

Peserta didik aktif dalam mengidentifikasi ciri pergaulan bebas dalam remaja, faktor yang memengaruhi, dan solusi yang bisa diberikan untuk menghindari pergaulan bebas melalui adanya aktivitas fisik.

h. Mata Pelajaran Bahasa Jawa

Siswa dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato kondisi sosial secara lisan dan/atau tulis yang bertemakan Kenakalan Remaja di Indonesia dengan tetap memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selain itu, siswa menganalisis unsur 5W+1H dalam teks wawancara tentang "*Kurang Gizi tumrap Kulawarga kang Kurang Mampu*"

i. Bimbingan Konseling

Dalam pembelajaran Bimbingan Konseling, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan, menyebutkan, dan merangkum kondisi remaja yang berada di lingkungan ia tinggal. Pembelajaran Bimbingan Konseling diberikan kepada peserta didik dengan edukasi dan pemahaman tentang isu seksualitas seperti kekerasan, pelecehan, dan cara pelaporan apabila menjadi korban

3. Integrasi Materi Kependudukan dengan Kegiatan Ekstrakurikuler/Kesiswaan

Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dilakukan melalui inovasi Podcast dari Tim PIK-R yang diunggah di *channel* youtube Semppati Surabaya. Salah satu podcast yang pernah dilakukan oleh TIM PIK-R yakni “Podcast Perkembangan Seksualitas Remaja bersama dokter Ratnasari dan psikolog Nur Eko”. Dalam hal ini TIM PIK-R berdiskusi mengenai pendidikan seksual yang terintegrasi dengan SSK mengenai materi

- a. Seberapa dan mengapa pendidikan seksual penting diberikan kepada siswa peserta didik
- b. Cara remaja merawat kesehatan reproduksi remaja yang baik dan benar
- c. Pengenalan perubahan organ kesehatan reproduksi remaja (Primer dan Sekunder)
- d. Kapan sebaiknya remaja berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi
- e. Kaitan pendidikan seksual, kehamilan remaja, dan pertumbuhan penduduk
- f. Cara untuk menoptimalisasi dan mengendalikan pertumbuhan penduduk
- g. Dampak apabila terjadi kehamilan pada usia remaja

Pada podcast PIK-R yang terintegrasi dengan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), terhighlight tentang integrasi Sekolah Siaga Kependudukan mengenai pertumbuhan penduduk, dengan pendidikan yang tepat maka akan menghindarkan peserta didik dengan isu Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang berujung pada Married By Accident (MBA) yang

tidak sejalan pada norma dalam masyarakat. Selain itu, terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dengan masa subur remaja yang panjang akan memengaruhi terjadinya ledakan populasi penduduk apabila remaja tidak diarahkan untuk merencanakan dan mempersiapkan kematangan dalam memiliki anak. Tidak hanya itu, dalam materi ini membahas tentang masyarakat miskin kota yang terjadi pada tingkat populasi yang tinggi akan meningkatkan tindakan kriminalitas.



Gambar 4.4 Kegiatan Integrasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) & PIK-R SMP Negeri 43 Surabaya

#### 5. Pojok Kependudukan

Pojok kependudukan dalam Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) perlu diadakan dan dibentuk berdasarkan lokasi strategis yang bertujuan untuk kemudahan aksesibilitas informasi isu-isu kependudukan. Implementasi yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 43 Surabaya yakni telah dibentuk dan disusun buku-buku sebagai literasi kependudukan yang berkaitan dengan kependudukan dan keluarga berencana. Buku yang telah tersedia di Pojok Kependudukan di SMP Negeri 43 Surabaya antara lain, buku “Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga” karya Drs. Andarus Darahim, M.PA., buku “Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan” karya Soenyono, dan lain-lain. Selain itu, SMP Negeri 43 Surabaya memberikan inovasi dalam Pojok Kependudukan dengan menampilkan karya-karya kebudayaan dalam kearifan lokal di dalam Pojok Karya Seni dan memberikan informasi kesehatan melalui *leaflet*.



*Gambar 4.5* Pojok Kependudukan SMP Negeri 43 Surabaya

#### 6. Papan Nama Sekolah Siaga Kependudukan

Sebagai identitas untuk menjadi Sekolah Siaga Kependudukan maka setiap sekolah yang terdaftar perlu membuat Papan Nama Sekolah Siaga Kependudukan. Papan nama SMP Negeri 43 Surabaya sebagai berikut



*Gambar 4.6* Papan Nama Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

### **4.5 Kendala Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR**

Dalam pelaksanaan MBKM terdapat beberapa kendala internal antara lain:

1. Keterlambatan dalam proses pemberian surat izin untuk pelaksanaan *Assesment* SSK sehingga sekolah yang akan dinilai merasa hal ini cukup mendadak bagi sekolah
2. Kesulitan untuk mencari narahubung untuk memberikan surat izin turun lapangan ke sekolah-sekolah yang telah didata oleh kantor
3. Renovasi ruangan yang menjadi tempat kami untuk mengerjakan tugas magang atau perihal lainnya cukup menjadi hambatan pelaksanaan MBKM

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sekolah Siaga Kependudukan adalah suatu program yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka menekan suatu isu-isu terkait kependudukan yang ada di Indonesia. Sekolah Siaga Kependudukan dapat menjadi wadah untuk dilaksanakannya sosialisasi program kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga (KKBP) dan yang menjadi sasaran sosialisasi adalah generasi muda sehingga dapat melibatkan peran dari lembaga pendidikan. Program SSK yang dilakukan oleh SMPN 42 Surabaya sudah memenuhi segala aspek instrumen kelengkapan, sehingga pada SMPN 42 Surabaya masuk dalam kategori paripurna dalam program SSK.

#### **5.2 Saran**

Saran yang perlu dilakukan untuk DP3APPKB yakni perlu adanya pematangan program sebelum adanya implementasi dengan melakukan perencanaan kebijakan yang berlandaskan faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung dalam implementasi program SSK perlu dipersiapkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) kualitas dan kuantitas, anggaran dana untuk *upgrading* kebijakan, aksesibilitas informasi dan koordinasi antara perencana program dan sasaran, serta partisipasi. Selain itu, sekolah menitipkan saran kepada instansi bidang OPD-KB antara lain

1. Untuk menjadi implementasi SSK yang dapat bersaing dengan kota-kota lain, pendampingan yang dilakukan tidak hanya secara administrative saja, tetapi juga pelaksanaan dalam pengembangan integrasi SSK perlu dilakukan dan ditingkatkan oleh OPD-KB dalam SSK
2. Perlu adanya satu persepsi antara OPD-KB dengan Sekolah dalam pelaksanaan SSK

3. Sekolah mengharapkan pendampingan dan informasi perihal monitoring dan evaluasi program agar program ini tidak hanya dilaksanakan secara administrative saja
4. Sebelum melakukan *assesment*, alangkah baiknya seluruh Kepala Sekolah dihadirkan untuk diberikan informasi secara resmi mengenai SSK sehingga tidak mendadak melakukan *assesment*
5. Keterkaitan jarak antara sosialisasi awal dengan tindak lanjut dilaksanakan dalam waktu dekat akan lebih baik agar sekolah mengerti bahwa Sekolah Siaga Kependudukan ini berlanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z dkk. (2014) *Materi Pembekalan Guru SMP dalam Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan dengan Kurikulum 2013*. Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan.
- Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2015) *Modul Pembekalan Guru SMP dalam Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan Tahun 2015*. Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan (2019) *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal, Dan Informal*. Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
- Tachjan, H., Mariana, D. and Paskarina, C. (2006) *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI.

*Lampiran II. Dokumentasi Assesment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 43 Surabaya*



**Pojok Kependudukan SMP Negeri 43 Surabaya**



**Sosialisasi “Kepedulian Remaja dalam Pencegahan Stunting”**



**Tim KKR SMP Negeri 43 Surabaya**



**Tim PIK-R SMP Negeri 43 Surabaya**



**Podcast Sekolah Siaga Kependudukan**



**Pelaksanaan *Assesment* Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)**



**Kegiatan Kader Kesehatan Remaja**



**Kegiatan Kader Kesehatan Remaja**



**Kegiatan Kader Kesehatan Remaja**



**Kegiatan Kader Kesehatan Remaja**

**Lampiran III. Dokumentasi Kegiatan MBKM**



**2 Oktober 2023**  
**Pembekalan Magang oleh DP3APPKB**



**3 Oktober 2023**  
**Entry Data Elsimil**  
**Kecamatan Tegalsari**



**10 Oktober 2023**  
**Evaluasi input data ELSIMIL dan**  
**evaluasi pengisian Pre-Test materi**



**10 Oktober 2023**  
**Diskusi dengan mentor tentang Jadwal**  
**Turun Lapangan dan**  
**Pembagian Assesment SSK**



**11 Oktober 2023**  
**Persiapan Survey dalam Kepedulian**  
**Remaja dalam Pencegahan Stunting**  
**dengan membuat kuesioner dan**  
**difinalisasi oleh Dr. Lutfi Agus**  
**Salim S.KM., M.Si.**



**12 Oktober 2023**  
**Menghadiri forum Konsultasi Publik**  
**Kebijakan dan Strategi Kota**  
**Surabaya 2021-2026**



**16 Oktober 2023**

**Supervisi oleh  
Dr. Lutfi Agus Salim S.KM., M.Si.**



**17 Oktober 2023**

**Kunjungan dan Diskusi mengenai  
keadaan PMKS di Dinsos Surabaya**



**23 Oktober 2023**

**Assesment SSK di SMPK Pirngadi  
Surabaya**



**23 Oktober 2023**

**Assesment SSK di  
SMP Muhammadiyah 7 Surabaya**



**23 Oktober 2023**

**Assesment SSK di SMP Islam Surabaya**



**23 Oktober 2023**

**Assesment SSK di SMP PGRI 8  
Surabaya**



**23 Oktober 2023**

**Assesment SSK di SMP Negeri  
3 Surabaya**



**24 Oktober 2023**

**Assesment SSK di SMP Negeri 10  
Surabaya**





**24 Oktober 2023**

***Assesment SSK di SMP Wachid Hasyim 2 Surabaya***



**24 Oktober 2023**

***Assesment SSK di SMP Negeri 1 Surabaya***



**25 Oktober 2023**

***Assesment SSK di SMP Negeri 4 Surabaya***



**25 Oktober 2023**

***Assesment SSK di SMP Katolik Stella Maris Surabaya***



**26 Oktober 2023**

***Assesment SSK di YPPI 1 Surabaya***



**30 Oktober 2023**

***Assesment SSK di SMP Negeri 43 Surabaya***



**30 Oktober 2023**



**31 Oktober 2023**

**Assesment SSK di SMP Negeri  
37 Surabaya**



**7 November 2023**

**Pemaparan Hasil Assesment Kelompok 3  
kepada dr. Atiek Tri Arini, M.Kes**

**Assesment SSK di SMP Kristen  
Petra 2 Surabaya**



**8 November 2023**

**Konsultasi Rencana Tindak Lanjut  
(RTL) pelaksanaan assesment dengan  
Mentor**



**10 November**

**Konsultasi Rencana Tindak Lanjut  
(RTL) dengan Mentor**



**14 November 2023**

**Supervisi dengan dosen-dosen**



**17 November 2023**

**Bimbingan dengan dr. Atiek Tri Arini,  
M.Kes. selaku Kabid tentang  
penjadwalan ulang advokasi dan  
pengarahan sosialisasi**



**20 November 2023**

**Diskusi *rundown* sosialisasi ulang SSK  
dan koordinasi penerjunan advokasi ke  
beberapa sekolah**



**22 November 2023**

**Pelaksanaan Advokasi di SMP Islam  
untuk menjadi Sekolah Siaga  
Kependudukan (SSK)**



**22 November 2023**

**Sosialisasi kepada siswa dan siswi SMP  
Islam Surabaya tentang Sekolah Siaga  
Kependudukan (SSK)**



**22 November 2023**

**Pelaksanaan advokasi di SMP  
Muhammadiyah 2 Surabaya**



**23 November 2023**

**Pelaksanaan Advokasi di SMA  
Negeri 19 Surabaya**



**23 November 2023**

**Pelaksanaan Advokasi di Ponpes  
Alfitroh Surabaya**



**24 November 2023**

**Pelaksanaan Advokasi di SMP  
PGRI 8 Surabaya**



**27 November 2023**



**27 November 2023**

**Pelaksanaan Sosialisasi SSK: Surabaya Menuju SSK Tingkat Dasar**



**29 November 2023**

**Pelaksanaan Sosialisasi SSK: Surabaya Menuju SSK Tingkat Dasar**



**8 Desember 2023**

**Evaluasi Panitia Pelaksanaan Sosialisasi SSK: Surabaya Menuju SSK Tingkat Dasar**



**12 Desember 2022**

**Evaluasi Program dan Diri**

**Seminar Hasil Magang**



**Penutupan Program *MBKM by Design* oleh Instansi**

**Lampiran IV. Hasil Assessment SSK SMP Negeri 43 Surabaya****ASSESSMENT SSK**

Nama Sekolah : SMP Negeri 43 Surabaya  
 Alamat Sekolah : Jalan Raden Saleh Nomor 12 Surabaya  
 No.Telepon : 081252881059  
 Media Sosial : officialsemppati (Instagram)  
 Website Sekolah : smp43sby.sch.id

NO	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
		ADA / YA	TIDAK	
1.	Sk SSK Kepala Sekolah	✓		
2.	Pojok Kependudukan	✓		
3.	Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK	✓		Diikuti oleh 1 Guru dan 1 Siswa perwakilan osis
4.	Orientasi Penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan (jumlah guru yang terlibat)	✓		
5.	Tersusunnya Kurikulum Materi Kependudukan dalam pembelajaran di kelas (jumlah MaPel)	✓		
6.	Integrasi Materi Kependudukan dengan kegiatan ekstrakurikuler/Kesiswaan	✓		
7.	Papan Nama SSK	✓		Papan nama masih dalam bentuk banner
8.	PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)	✓		PIK-R aktif dalam media <i>Youtube</i>
9.	Kesediaan sekolah mengikuti kegiatan SSK	✓		
10	Saran dan masukan tentang SSK			

Surabaya, 30 Oktober 2023

*Lampiran V. Surat Penugasan Assesment SSK*



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya  
Telp. (031) 5346317 Fax. (031) 5480904

**SURAT PERINTAH**

NOMOR 400.13 /10809/436.7.8/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. IDA WIDAYATI, MM  
Jabatan : Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

*(Daftar Nama Terlampir)*

Untuk : 1.Melaksanakan Penilaian Awal (assessment) Pembentukan Sekolah Siaga  
Kependudukan pada :

Hari : Senin s/d Jum'at  
Tanggal : 23 s/d 31 Oktober 2023  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Lokasi : Terlampir

2.Melaporkan hasil-hasil kegiatan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan.  
3.Demikian Surat Perintah ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan  
penuh rasa tanggung jawab

Surabaya, 17 Oktober 2023



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

*Lampiran VI. Surat Penugasan Advokasi SSK*



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya  
Telepon: (031) 5346317 Faksimile: (031) 5480904

**SURAT PERINTAH**

NOMOR 400.13 /12202/436.7.8/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. IDA WIDAYATI, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

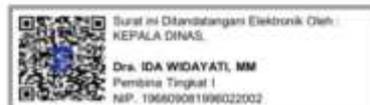
(Daftar Nama Terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan Advokasi Kegiatan Sekolah Slaga Kependudukan pada :

Hari/Tanggal : Rabu s/d Jumat  
Tanggal : 22 s/d 23 November 2023  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Lokasi : Terlampir

2. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan sebagai bahan acuan kerja;  
3. Melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 18 November 2023



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

*Lampiran VII. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi SSK*



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya  
Telepon. (031) 5346317 Faksimile. (031) 5480904

Surabaya, 24 November 2023

Kepada

Yth. Ka. Dinas Pendidikan  
di -  
Surabaya

Nomor : 400.13 /12487/436.7.8/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Permohonan Bantuan  
Menghadirkan Peserta  
Kegiatan Sosialisasi Sekolah  
Siaga Kependudukan (SSK)  
Tahun 2023

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2023 untuk Guru dan Siswa SMP/MTS di Kota Surabaya yang akan diselenggarakan pada :

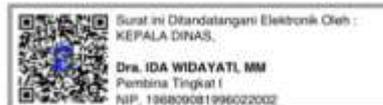
Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023  
Pukul : 12.30 WIB - Selesai  
Tempat : Graha Sawunggaling Lt. 6 Surabaya  
Alamat : Jl. Jimerto No. 25 - 27 Surabaya

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk menghadirkan 4 (empat) peserta dari masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah;
2. Guru Mata Pelajaran IPS/Guru Ekstrakurikuler; dan
3. Perwakilan Pengurus OSIS kelas 8 sebanyak 2 (dua) orang.

Adapun daftar nama sekolah sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

